

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 angka 15).

Administrasi kependudukan, termasuk pencatatan kelahiran merupakan pengakuan negara terhadap status pribadi dan status seseorang. Pencatatan kelahiran merupakan implementasi hak asasi anak, pencatatan kelahiran sebagai pengakuan negara pelaksanaannya didasarkan pada hukum positif Indonesia.

Jadi agar terjaminnya hak azasi anak, negara harus melakukan pencatatan terhadap setiap peristiwa kelahiran, untuk itu Pemerintah telah melakukan pendataan terhadap penerbitan akta kelahiran terutama bagi anak usia 0-18 tahun, sebagaimana menurut Database Kependudukan Nasional kepemilikan akta kelahiran anak (0-18 tahun) masih rendah, hal ini disebabkan :

- a. Sebelumnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum menggunakan SIAK dalam Pencatatan Kelahiran.
- b. Masyarakat pada umumnya belum menganggap penting untuk memiliki akta-akta pencatatan sipil khususnya akta kelahiran, terutama di daerah/wilayah tertinggal, terisolir dan terpencil.
- c. Masih terdapat regulasi yang sulit untuk dilaksanakan dalam melakukan pencatatan kelahiran (saksi peristiwa, buku nikah dll).

Karena masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun maka Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun dan mentargetkan secara Nasional diakhir Desember 2019 kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun sebesar 90%.

Untuk itu, dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di Provinsi Sumatera Barat maka Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar kepemilikan Akta kelahiran Anak usia 0-18 tahun sebesar 90% dapat terwujud, salah satunya melalui kegiatan Rakor Tingkat Kab/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun, yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 3 September 2019, bertempat di “ **Hotel Sakura Syariah**” **Lubuk Basung Kabupaten Agam**.

B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN :

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- c. DPA-OPD DPPKKBKPS Tahun Anggaran 2019 kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 tahun.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN

● MAKSUD

Maksud pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun ini antara lain, adalah dalam rangka merealisasikan Target Nasional untuk cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 tahun sebesar 90% diakhir Desember 2019.

● TUJUAN

- a. Memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan hak anak dalam bentuk akta kelahiran.
- b. Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran

D. SASARAN KEGIATAN :

- a. Evaluasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-18 Tahun pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
- b. Mencarikan solusi atas permasalahan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun.
- c. Strategi Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dikalangan Anak (0-18 Tahun).

B A B II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PESERTA

Peserta Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun ini sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang, masing-masing Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Capil dan 1 (satu) orang Kepala seksi yang membidangi akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

B. MATERI DAN NARA SUMBER

- Evaluasi Capaian Target Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Kebijakan Teknis Dalam Pencapaian Target Nasional Kepemilikan Akta Kelahiran disampaikan oleh Pejabat dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;
- Perkiraan Capaian Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun. oleh Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk KB Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Sinkronisasi Dokumen Kependudukan dengan Data Pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

C. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun, dilaksanakan tanggal 1 s/d 3 September 2019, bertempat di “**Hotel Sakura Syariah, Lubuk Basung Kabupaten Agam**”.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun, dengan metode, yakni :

1. Metode Penyajian/ Pemaparan;
2. Diskusi/ Tanya jawab.

D. PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan ini terdapat pada dana DAK DPA-OPD Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, dengan judul kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akta kelahiran Anak usia 0-18 Tahun, Kode Rekening 1.02.06.1.02.08.01.099.018.

E. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Tujuan dilaksanakan Rapat Koordinasi adalah untuk;

- a. Melakukan analisa pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara Kepala Dinas Dukcapil dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri yang meliputi pencapaian akta kelahiran anak usia 0- 18 tahun sebesar 90%.
- b. Meningkatkan kinerja Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan Provinsi yang dilihat dari capaian bulanan, peningkatan kinerja bulanan dan pencapaian kinerja tahunan dibidang akta kelahiran.
- c. Untuk melakukan penyamaan persepsi tentang pencapaian akta kelahiran anak usia 0 - 18 tahun serta melakukan adopsi kiat-kiat Kabupaten/Kota lain dalam peningkatan pencapaian akta kelahiran anak usia 0-18 tahun.

1. Pembahas :

Pembahasan dilakukan oleh 5 Narasumber sebagai berikut;

- 1). H. Novrial, SE, MA, Akt (Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat) dengan Materi Evaluasi Capaian Target Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun.
- 2) Sakaria, SH.M.Si (Kepala Sub Direktorat Fasilitas Pencatatan Kelahiran dan Kematian Ditjen Dukcapil) dengan materi Kebijakan Teknis Dalam Pencapaian Target Nasional Kepemilikan Akta Kelahiran anak.
- 3) Ir. Putri Reno Sari, M.Si (Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat)
- 4) Ahmad Zakri, S Sos, M.Si (Kabid Perencanaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat) dengan materi Sinkronisasi Dokumen Kependudukan dengan Data pendidikan.

2. Hasil Pembahasan :

- a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat membahas tentang Evaluasi capaian kepemilikan akta anak usia 0-18 Tahun sebagai berikut :

- ✓ Untuk Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun per Juli 2019 Provinsi Sumatera Barat sekitar 86,45 % data ini masih rendah dan belum mencapai target Nasional Anak Usia 0-18 Tahun sekitar 90 %.
- ✓ Untuk Cakupan Pelayanan Akta kelahiran yang masih rendah, agar dapat untuk memetakan yang belum mempunyai Akta Kelahiran per Kecamatan dan Per Nagari.
- ✓ Dalam pencapaian target akta kelahiran anak usia 0-18 Tahun dengan melakukan pelayanan berbasis data by name by address, berdasarkan mapping data per nagari untuk mengetahui target layanan secara kuantitatif.
- ✓ Menyusun rencana kerja September s/d Desember Tahun 2019 dengan target bulanan/harian penduduk yang belum punya akta kelahiran dan evaluasi secara konsisten setiap bulannya,
- ✓ Untuk validitas data pencapaian target, hanya melakukan entri akta kelahiran anak usia 0-18 tahun yang diterbitkan/diberikan kutipan akta kelahiran pada masyarakat.

b. Kepala Sub Direktorat Jenderal Fasilitasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian Direktorat Pencatatan Sipil Dirjen Dukcapil Bapak, Sakaria, SH.MSi membahas tentang :

- ✓ Strategi Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dengan penerapan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dengan tujuan memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak dalam bentuk akta kelahiran dan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran.
- ✓ Lebih menyederhanakan persyaratan pencatatan kelahiran dan tata cara pencatatan kelahiran.

- ✓ Hal yang mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 yaitu :
 1. Pemberlakuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi WNI/penduduk yang tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - a. Surat Keterangan Lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran
 - b. Akta nikah/kutipan akta perkawinan
 - c. Berita Acara (BAP) dari Kepolisian, bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
 2. SPTJM sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.
 3. Status Hukum Anak dalam Akta Kelahiran :
 - a. Anak Pasangan Suami Istri
 - b. Anak Dari Ayah dan Ibu dengan Penambahan Frasa
 - c. Anak Seorang Ibu
 - d. Anak Yang Tidak Diketahui asal-Usulnya
 4. Penambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan” dalam register dan kutipan akta kelahiran, apabila tidak memiliki akta nikah/akta perkawinan tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan sebagai suami isteri.

5. Tidak adanya tanda tangan saksi kelahiran di dalam register akta `kelahiran.
 6. Penerapan pencatatan kelahiran secara online, dilakukan dengan cara:
 - a. Pemohon registrasi pada: <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layanan> online utk mendapat hak akses sbg pengguna aplikasi
 - b. Pemohon mendapatkan SMS kode aktivasi untuk pembuatan akun.
 - c. Pemohon mengisi formulir pd aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyaratan.
 - d. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data permohonan
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil (PPS) menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran secara elektronik.
 - f. Pemohon mencetak sendiri kutipan akta kelahiran.
- ✓ Pelayanan Stelsel Aktif oleh Petugas
- a. Pemerintah melalui petugas berperan aktif dlm pelayanan dgn mendekatkan tempat pelayanan kpd penduduk serta melaksanakan pelayanan keliling (mobile enrollment)/ jemput bola (Jebol) kpd penduduk. Hal ini sesuai dg amanat dlm Penjelasan UU No. 24 Thn 2013.
 - b. Dinas Dukcapil Kab/Kota dlm melaksanakan pelayanan keliling tersebut, agar lebih efektif, dilaksanakan dgn berbasis pd data kependudukan yang telah dibersihkan oleh Pemerintah Pusat (Ditjen Dukcapil Kemendagri). Data kependudukan tersebut berupa data by NIK, by name, by address yg bersumber dari Database SIAK yg sudah teridentifikasi status sipilnya dan sudah melalui verifikasi lapangan, sehingga penyelesaian penerbitannya dapat terukur sampai dusun/kampung/ RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kab/kota.
- ✓ Melibatkan Instansi lain pemangku kepentingan seperti :
- a. Dinas Kesehatan/RS/Puskemas/Fasilitas Kesehatan

Dalam hal ini ada koord/kerjasama antara Dinas Dukcapil dg Dinas Kesehatan, RS/Fasilitas Kesehatan dlm pencatatan kelahiran (Relasi Pencatatan Kelahiran dgn Kesehatan), melalui :

- Penolong Persalinan/Bidan secara formal menjadi bagian dari pencatatan kelahiran (ada SK Kepala Daerah; ada hak dan kewajiban; ada insentif, ada Bintek/capacity building, dll);
- Pelayanan online dari Faskes Bersalin ke Dispendukcapil untuk typologi Kota.
- Pelibatan Bidan Desa untuk typology Kabupaten/remote area (Kerjasama Dinas Dukcapil dengan Dinas Kesehatan/RS/ Puskesmas, juga dapat dikembangkan untuk meningkatkan cakupan pencatatan kematian).

b. Dinas Sosial

Untuk penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak yg berada di Panti asuhan. Bagi anak-anak Panti yg tdk memiliki dokumen apapun, perlu ada kerjasama dg instansi terkait, seperti : Kepolisian, Pengadilan setempat.

c. Dinas Pendidikan

Sekolah merupakan sumber informasi bagi Dinas Dukcapil untuk mengetahui anak yg belum memiliki akta kelahiran atau anak yg sudah memiliki akta kelahiran tetapi di dlm SIAK kepemilikan akta nya belum ter- record. Penulisan Nama dlm Ijazah berpedoman ke Akta Kelahiran, agar tidak timbul masalah di kemudian hari.

d. PKK

Memberikan Informasi kepada para kader dan Tim Penggerak PKK (Dasawisma, Posyandu, dll) untuk mensosialisasikan pentingnya akta pencatatan sipil kpd seluruh anggota masyarakat utamanya kpd ibu-ibu rumah tangga.

- e. Melibatkan LSM, Karang Taruna, dsb, dlm memberikan sosialisasi kpd masyarakat arti pentingnya pencatatan sipil.
- ✓ Kemendagri telah menerbitkan kebijakan yang mendorong pelayanan dukcapil dilaksanakan secara terintegrasi melalui Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
 - ✓ Layanan terintegrasi di bidang pencatatan kelahiran ini tidak terlepas dari integrasi sistem pencatatan kelahiran dengan layanan kesehatan terutama yang menyelenggarakan layanan bersalin.
 - ✓ Dinas Dukcapil yang telah melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin/Bidan PraktekSwasta/Puskesmas/Bidan Desa telah dapat melayani bayi baru lahir untuk segera dicatatkan pada Dinas Dukcapil.

 - ✓ Untuk lebih mengoptimalkan integrasi tersebut telah diterbitkan Surat Dirjen Dukcapil pada tanggal 12 April 2019 yang memberikan pedoman kepada Dinas Dukcapil untuk melakukan kerjasama dg instansi kesehatan tidak hanya pada saat kelahiran, tapi sudah dimulai pada saat ibu hamil memeriksakan kehamilannya.
 - ✓ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang belum melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan terkait Akta Kelahiran agar melakukan kerjasama .
 - ✓ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah melakukan kerjasama (PKS) pelayanan dengan Dinas Kesehatan dan belum ada tindaklanjutnya dari kerjasama itu, agar Dinas Kesehatan/Puskesmas/Dpokter/Bidan untuk melaporkan anak yang lahir dan data ibu sedang hamil ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
 - ✓ Kabupaten/Kota yang capaian Kepemilikan Akta Kelahiran yang masih rendah dan belum mencapai target Nasional agar melakukan upaya-upaya meningkatkan

pelayanan untuk mencapai target nasional, sesuai dengan kebijakan yang telah diterbitkan oleh Kementerian yang mendorong pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan secara teribtegritas melalui Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan administrasi Kependudukan

c. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat disimpulkan sebagai berikut

- ✓ Capaian Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 tahun dimana 3 (tiga) kepemilikan tertinggi dan mencapai target Nasional dilakukan oleh :
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan persentase 98,58%
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Sawahlunto dengan persentase 96,64%.
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Padang Panjang dengan persentase 96,04%

- ✓ Sedangkan Capaian Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun yang mencapai target Nasional sekitar 90 % yaitu
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dengan persentase 95,49%.
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dengan persentase 93,35 %.
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar dengan persentase 93,25 %
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dengan persentase 92,79 %
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasaman Barat dengan persentase 92,43 %
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mentawai dengan Presentase 92,29 %

- ✓ Jumlah target kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun pada masing-masing Kabupaten/Kota yang masih belum mencapai angka 90% ada pada 10 Kabupaten/Kota yaitu;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Solok dengan Presentase 86,97 %
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sijunjung dengan presentase 89,87 %
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman dengan presentase 81,65 %
 - Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Agam dengan presentase 86,12 %
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. 50 Kota 89,12 %
 - Dinas kependuduakn dan Pencatatan sipil Kab. Pasaman dengan presentase 72,64 %
 - Dinas kependudukan dan pencatatn Sipil Kab. Dharmasraya dengan presentase 79,83 %
 - Dinas Kependuduakn dan Pencatatan Kab. Solok Selatan dengan presentase 76,72 %
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dengan presentase 77,86 %
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman dengan presentase 84,88 %

- ✓ Untuk mencapai angka 90% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota harus melakukan pelayanan berbasis data by name by adres berdasarkan mapping data untuk per Nagari untuk mengetahui target layanan secara kuantitati.

- ✓ Memaksimalkan pemutakhiran data dan konversi data yakni data kepemilikan akta kelahiran Non SIAK. Serta mengundang Kecamatan dan Nagari untuk memberikan sosialisasi terkait validasi data yang sudah atau yang belum memepunyi Akta Anak Usia 0-18 Tahun.

- ✓ Dinas Kependudukan dan pencatatan Kabupaten/Kota harus memiliki target kerja bulanan dan harian agar dapat mencapai kepemilikan akta anak usia 0-18 Tahun.

- ✓ Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam rapat koordinasi

tersebut sudah disepakati dan ditanda tangani Buku Putih terkait bagaimana caranya dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing Kabupaten/Kota, yang akan dijadikan panduan dalam penyelesaian permasalahan bidang pencatatan sipil pada kabupaten/kota.

- ✓ Disepakati semua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sudah melaksanakan aplikasi-aplikasi (seperti E-monev, Akta Kelahiran Online dan Tanda Tangan Elektronik) paling lambat akhir bulan September 2019.

d. Kepala Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ahmad Zakri, S Sos, M.Si menjelaskan tentang Sinkronisasi Dokumen Kependudukan dengan Data Pendidikan antara lain :

- Dinas Pendidikan selalu mengambil data awal berupa Akta Kelahiran untuk Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dalam menerima murid baru, adanya perbedaan data pada Akta Kelahiran dan Ijazah itu disebabkan karena masyarakat itu sendiri.
- Sistem DAPODIK Dinas Pendidikan yang mengharuskan bahwa anak yang masuk SD harus berumur 7 Tahun dan anak masuk SMP berumur maksimal 15 Tahun.
- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memberikan saran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar tidak memberikan perubahan Akta Kelahiran Kepada Masyarakat yang minta.
- Membuat Rekapitulasi Kabupaten/Kota yang mengalami hal yang sama terkait permasalahan dengan DAPODIK dan mengirimkan ke Pemerintah Provinsi untuk dijadikan bahan dalam rapat di Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

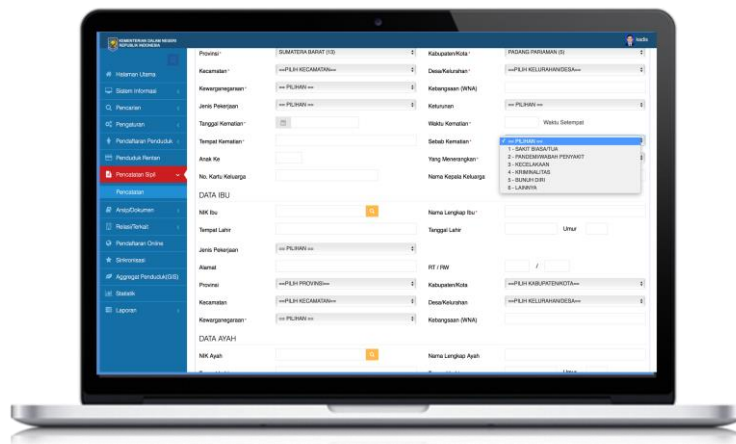
e. Narasumber Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Bapak M.Fadhly, S AP.MM menjelaskan tentang Aplikasi Pemanfaatan data Untuk Meningkatkan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun, menjelaskan sebagai berikut ;

- Pencatatan Kelahiran dan Kematian melibatkan banyak stakeholder, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Padang Pariaman melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder dengan membangun jaringan untuk pemanfaatan data kependudukan seperti pencatatan kelahiran dan kematian antara lain :

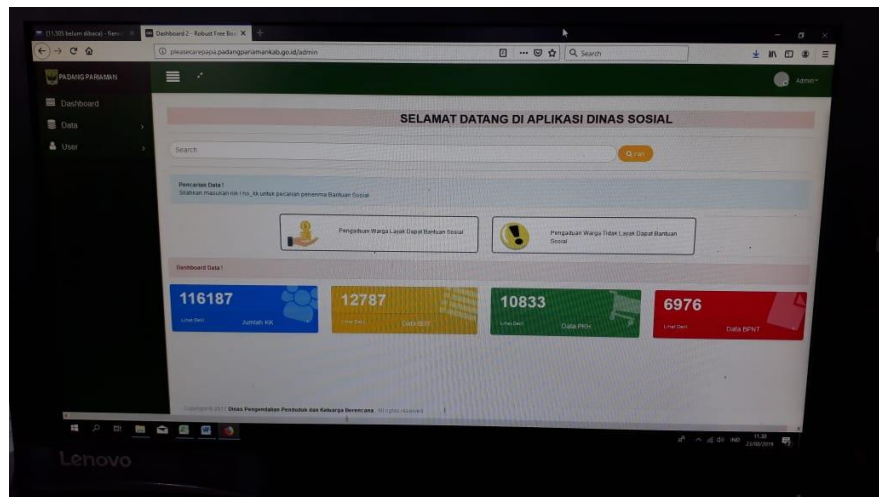
1. Sistem Pelaporan Kelahiran dan Kematian, dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter/Bidan dan Petugas Kesehatan dengan penyamaan persepsi penggunaan data kependudukan di bidang kesehatan.

Sistem Pelaporan Kelahiran dan Kematian



2. Aplikasi Dinsos PleasecarePapa dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman terkait data kependudukan yang menerima bantuan, apakah masyarakat itu layak di berikan bantuan dari Dinas Sosial atau tidak dengan cara petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Padang pariaman langsung mengecek kelapangan, sesuai dengan data yang ada.

Aplikasi Dinsos PleasecarePapa



3. Aplikasi SIPAKEM meliputi :

- Aplikasi pencatatan mulai masa kehamilan dan mendukung program bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas (KIA).
 - Pelaporan Kematian dengan penyebab kematian sesuai standar dan Pelaporan penyebab kematian membutuhkan Autopsi Verbal
 - Menghasilkan data record yaitu Data yang dihasilkan dari proses entri secara berkesinambungan akan menjadi bahan laporan yang selama ini manual menjadi elektronik, bahan evaluasi dan arsip elektronik.
 - Disdukcapil mendapatkan data potensi penerbitan akte kelahiran dan kematian
4. Perlu melakukan pembahasan tentang efektifitas pengisian form pada pelaporan kelahiran dan kematian, pelaporan gizi (e-PPGBM) dan pencatatan pada buku KIA
5. Perlu mengintensifkan pertemuan antar stakeholder untuk kelancaran program, kolaborasi antar OPD Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan dengan kewenangan masing-masing dan dibutuhkan dukungan kebijakan untuk pelaksanaan di daerah terutama terkait pendanaan dan SDM

BAB III

P E N U T U P

Dari Laporan hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun se-Sumatera Barat, di dapat kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. KESIMPULAN :

- a. Pemerintah Provinsi dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 Tahun mempunyai peran diantaranya fasilitasi Inovasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pencatatan kelahiran di Kabupaten/Kota dan Fasilitasi perhitungan dan pencapaian target kepemilikan akta kelahiran (perbulan, perminggu dan perhari) dimasing-masing Kabupaten/Kota dengan melakukan mapping data per Kecamatan dan tetap melakukan pelayanan keliling ke Nagari- Nagari.
- b. Dalam pelaksanaan Rakor telah disampaikan agar Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dalam menyelesaikan permasalahan pencatatan sipil harus merujuk kepada peraturan Perundang-Undangan, kebijakan Nasional atau Keputusan pengadilan.
- c. Cakupan Agar cakupan akta kelahiran mencapai target di Kabupaten/Kota, maka dilakukan pemetaan data-data akta kelahiran per Kecamatan/ Nagari, sehingga Kabupaten/Kota yang belum mencapai target bisa tau mana Kecamatan/Nagari mana yang belum membuat akta kelahiran
- d. Melakukan pelayanan berbasis data by name by address, berdasarkan mapping data per Nagari untuk mengetahui target layanan secara kuantitatif.
- e. Menyusun rencana kerja September s/d Desember 2019 dengan target bulanan/harian penduduk yang belum punya akta kelahiran dan evaluasi secara konsisten setiap bulannya.
- f. Untuk Validitas data pencapaian target, hanya melakukan entri register akta kelahiran anak usia 0-18 Tahun yang diterbitkan/diberikan kutipan akta kelahirannya pada masyarakat dan dapat melakukan percepatan kepemilikan akta kelahiran anak

- usia 0-18 Tahun dengan melakukan kiat-kiat percepatan seperti klarifikasi ke lapangan untuk memastikan keberadaan penduduk usia 0-18 Tahun dan lain-lain.
- g. Agar melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan seperti Kerjasama dengan Puskesmas, Dokter, bidan terkait dengan anak yang baru lahir maupun ibu yang sedang hamil.
 - h. Kabupaten/Kota yang sudah melakukan PKS dengan Dinas Kesehatan, maka Puskesmas, Dokter dan Bidan agar melaporkan anak yang lahir dan data ibu yang sedang hamil ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kab/kota
 - i. Kementerian telah menerbitkan kebijakan yang mendorong pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan secara terintegrasi melalui Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan .
 - j. Dinas Pendidikan selalu mengambil data awal kependudukan berupa Akta Kelahiran untuk DAPODIK dalam menerima murid baru .
 - k. Dinas Pendidikan memberikan saran kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil agar tidak memberikan perubahan Akta Kelahiran kepada Masyarakat yang minta.
 - l. Dinas Pendidikan telah menjadikan data Kependudukan sebagai dasar DAPODIK

B. SARAN

- a. Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mencapai target 90% kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 Tahun untuk dapat melakukan percepatan dengan melahirkan inovasi layanan agar diakhir Desember 2018 dapat terealisasi.
- b. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat agar menindaklanjuti

kesimpulan Rakor Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun untuk pencapaian target Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.

- c. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka untuk tahun berikutnya perlu dialokasikan lagi anggarannya.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.

KEPALA DINAS,



H. NOVRIAL, SE, MA, Akt.
Pembina Utama Muda
NIP.19661105 199403 1 005